

LAPORAN KEUANGAN

Direktorat Bina Gizi

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2015

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9

Jakarta 12950

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

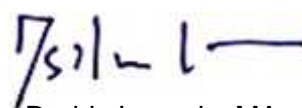
Direktorat Bina Gizi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Bina Gizi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Bina Gizi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Juli 2015

Direktur Bina Gizi,



Ir. Doddy Izwardy, MA
NIP. 19630216 198603 1005



KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

JL. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telp. Dirjen. 021-5203871, Set. Ditjen 021-5221225 - 5221226

Telp. Dit Bina Gizi: 021-5203883, Dit Bina Kes. Ibu: 021-5221227, Dit Bina Kes Anak: 021-5273422,
Dit Yankes Tradisional, Alternatif & Komplementer 021-5203116, Dit Bina Kesja & Olahraga: 021-5275256

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Bina Gizi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Juli 2015

Direktur Bina Gizi,

Ir. Doddy Izwardy, MA
NIP. 19630216 198603 1005

Laporan Keuangan Direktorat Bina Gizi Semester I Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 188.609.251,-. Pada TA 2015, Direktorat Bina Gizi tidak mempunyai estimasi Pendapatan Negara.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2015 adalah sebesar Rp. 115.865.652.323,- atau mencapai 41,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 276.936.058.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2015 .

Nilai Aset per 30 Juni 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 52.479.933.697,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 51.316.980.759,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 1.011.802.938,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 151.150.000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 2.164.922.000,- dan Rp. 50.315.011.697,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 188.609.251,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 110.009.075.472,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (109.820.466.221,-). Tidak terdapat nilai surplus/(defisit) untuk Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (109.820.466.221,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 45.164.699.616,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (109.820.466.221,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (706.264.770,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 115.677.043.072,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 50.315.011.697,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT BINA GIZI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2015		% thd Angg	30 JUNI 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	188,609,251	0.00	2,999,404
JUMLAH PENDAPATAN		0	188,609,251	0.00	2,999,404
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0.00	0
Belanja Barang	B.4	276,625,158,000	115,610,990,323	41.79	12,650,155,918
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0	0	0.00	0
Jumlah Belanja Operasi		276,625,158,000	115,610,990,323	41.79	12,650,155,918
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0	0	0.00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	310,900,000	254,662,000	81.91	167,475,000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0	0	0.00	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0	0	0.00	0
Belanja Modal Lainnya	B.10	0	0	0.00	0
Jumlah Belanja Modal		310,900,000	254,662,000	81.91	167,475,000
JUMLAH BELANJA		276,936,058,000	115,865,652,323	41.84	12,817,630,918

II. NERACA

DIREKTORAT BINA GIZI NERACA PER 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2015	31 Desember 2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2,164,922,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	715,872,116
Persediaan	C.3	49,152,058,759	43,496,358,027
Jumlah Aset Lancar		51,316,980,759	44,212,230,143
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	4,802,928,680	4,563,996,680
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5	(3,791,125,742)	(3,753,069,861)
Jumlah Aset Tetap		1,011,802,938	810,926,819
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.6	151,150,000	151,150,000
Aset Lain-Lain	C.7	182,306,000	190,278,500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(182,306,000)	(190,278,500)
Jumlah Aset Lainnya		151,150,000	151,150,000
JUMLAH ASET		52,479,933,697	45,174,306,962
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.9	2,164,922,000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	-	4,552,800
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	-	5,054,546
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2,164,922,000	9,607,346
JUMLAH KEWAJIBAN		2,164,922,000	9,607,346
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	50,315,011,697	45,164,699,616
JUMLAH EKUITAS		50,315,011,697	45,164,699,616
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		50,315,011,697	45,164,699,616

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT BINA GIZI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	188,609,251	-
JUMLAH PENDAPATAN		188,609,251	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	379,147,863	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	64,941,595,416	-
Beban Pemeliharaan	D.5	49,335,000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3,811,043,437	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	40,774,167,875	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	53,785,881	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		110,009,075,472	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(109,820,466,221)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(109,820,466,221)	-
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(109,820,466,221)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT BINA GIZI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	45,164,699,616	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(109,820,466,221)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		(706,264,770)	-
Jumlah Lain-Lain		(706,264,770)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	115,677,043,072	-
EKUITAS AKHIR		50,315,011,697	-

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Bina Gizi

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Direktorat Bina Gizi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Entitas berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan.

Direktorat Bina Gizi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina gizi. Melalui peran Direktorat Bina Gizi diharapkan dapat meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, sasaran keluaran Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat tahun 2015 adalah meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang ditentukan dengan indikator sebagai berikut :

1. 13% ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan;
2. 82% ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD);
3. 39% bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif;
4. 38% bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
5. 70% balita kurus yang mendapat makanan tambahan; dan
6. 10% remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Bina Gizi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Bina Gizi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Bina Gizi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Bina Gizi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Bina Gizi adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Bina Gizi adalah Pendapatan Denda yang diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Rp.
188.609.251,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 188.609.251,-. Pendapatan Direktorat Bina Gizi terdiri dari Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI) maupun Auditor Internal (Inspektorat Jenderal Kemenkes RI). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Denda	0	104,092,631	0.00
Pendapatan Lain-Lain	0	84,516,620	0.00
Jumlah	0	188,609,251	0.00

Realisasi Pendapatan Denda periode 30 Juni 2015 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama TA 2014. Hal ini disebabkan oleh tindak lanjut LHP terhadap Laporan Keuangan Direktorat Bina Gizi TA 2014 yang telah diselesaikan dengan menyetorkan ke kas negara. Pendapatan denda tersebut merupakan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah TA 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Denda keterlambatan (2 hari) pendistribusian buffer stock PMT/MP-ASI TA 2014 atas nama PT. Karya Mitra Kencana sebesar Rp. 375.957,- dengan bukti setor NTPN : 1301050200131207 tanggal 6 April 2015.
2. Denda keterlambatan (7 hari) pendistribusian buffer stock PMT/MP-ASI TA 2014 atas nama Setia Jayatama Logistik sebesar Rp. 1.283.024,- dengan bukti setor NTPN : 0515050714041303 tanggal 6 April 2015.
3. Denda keterlambatan (2 hari) pendistribusian buffer stock PMT/MP-ASI TA 2014 atas nama PT. Wahana Mitra Internusa sebesar Rp. 335.508,- dengan bukti setor NTPN : 0109141305020108 tanggal 6 April 2015.
4. Denda keterlambatan (13 hari) pendistribusian buffer stock PMT/MP-ASI TA 2014 atas nama CV. Tiki Indonesia Karawang sebesar Rp. 2.098.142,- dengan bukti setor NTPN : 1005150303070801 tanggal 6 April 2015.
5. Denda keterlambatan Pengadaan MP-ASI TA 2008 atas nama PT. Indofarma Global Medika sebesar Rp. 100.000.000,- dengan bukti setor NTPN : 0402051512000203 tanggal 1 Juni 2015.

Selain itu, Pendapatan Lain-lain Direktorat Bina Gizi periode 30 Juni 2015 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama TA 2014 yang berasal dari pendapatan anggaran lain-lain yaitu kelebihan pembayaran terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan pendistribusian buffer stock PMT/MP-ASI TA 2014 kepada Andalas Megatama Persada sebesar Rp. 24.931.500,- dan telah dikembalikan ke kas negara dengan bukti setor NTPN : 0103061105100102 tanggal 6 April 2015.
2. Kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan pendistribusian buffer stock PMT/MP-ASI TA 2014 kepada Rodo Rejeki sebesar Rp. 59.585.120,- dan telah dikembalikan ke kas negara dengan bukti setor NTPN : 0705090710000603 tanggal 6 April 2015.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2015	Realisasi per 30 Juni 2014	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Denda	104,092,631	2,392,217	4,251.30
Pendapatan Lain-Lain	84,516,620	607,187	13,819.37
Jumlah	188,609,251	2,999,404	6,188.22

*Realisasi Belanja
Negara Rp Rp.
115.865.652.323,-*

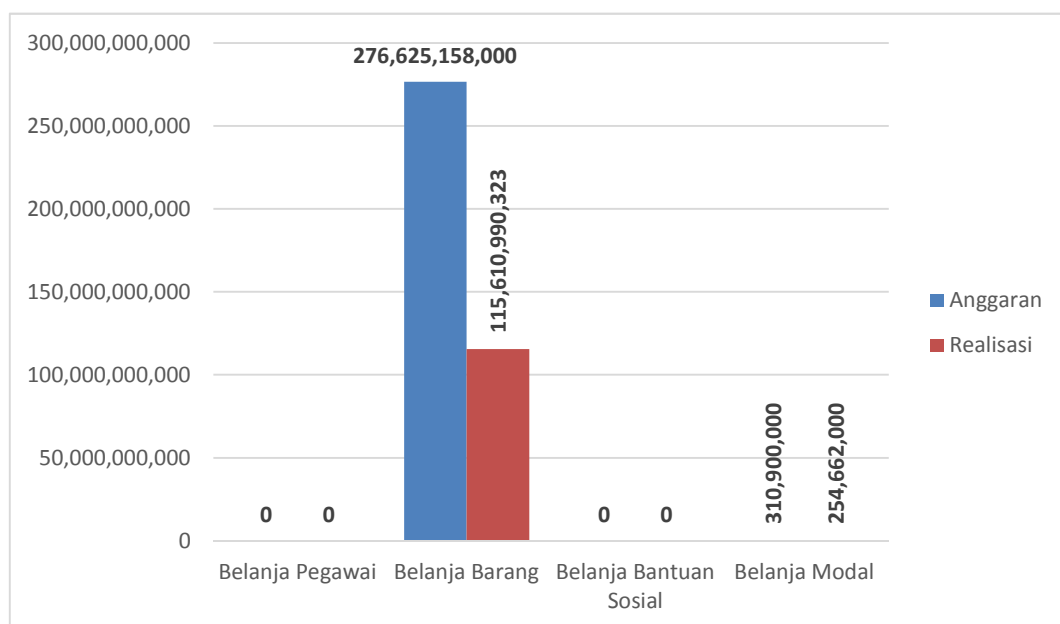
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 115.865.652.323,- atau 41,84% dari anggaran belanja sebesar Rp. 276.936.058.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0.00
Belanja Barang	276,625,158,000	115,610,990,323	41.79
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Belanja Modal	310,900,000	254,662,000	81.91
Total Belanja Kotor	276,936,058,000	115,865,652,323	41.84
Pengembalian Belanja		0	
Jumlah	276,936,058,000	115,865,652,323	41.84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2014, Realisasi Belanja periode 30 Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar 803,96% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Alokasi anggaran belanja Semester I TA 2015 (Rp. 276.936.058.000,-) yang meningkat 66,87% dibanding alokasi anggaran belanja TA 2014 periode yang sama (Rp. 165.959.000.000,-)
2. Proses pengadaan barang dengan nilai diatas 200 juta telah dimulai sejak DIPA TA 2015 diterima yaitu pada tanggal 14 November 2014, sehingga pada periode Semester I TA 2015 pengadaan tersebut telah terealisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI per 30 JUNI 2015	REALISASI per 30 JUNI 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	115,610,990,323	12,650,155,918	813.91
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	254,662,000	167,475,000	52.06
Jumlah	115,865,652,323	12,817,630,918	803.96

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2015, Direktorat Bina Gizi tidak ada alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai. Untuk Belanja Pegawai dialokasikan dan direalisasikan di satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA.

Belanja Barang Rp.
115.610.880.323,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 115.610.990.323,- dan Rp. 12.650.155.918,-. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2015 mengalami kenaikan 813,91% dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan diantaranya yaitu belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, disamping menurunnya biaya keperluan perkantoran, operasional satuan kerja dan belanja perjalanan biasa serta paket meeting luar kota sampai dengan 30 Juni 2015.

Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI per 30 Juni 2015	REALISASI per 30 Juni 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja keperluan perkantoran	145,800,000	150,300,000	(2.99)
Belanja honor operasional satuan kerja	148,500,000	180,900,000	(17.91)
Belanja bahan	321,520,945	201,061,900	59.91
Belanja honor output kegiatan	57,220,000	35,400,000	61.64
Belanja barang non operasional lainnya	56,250,000	0	100.00
Belanja barang persediaan barang konsumsi	60,172,846,683	0	100.00
Belanja sewa	36,020,000	3,180,000	1,032.70
Belanja jasa profesi	336,800,000	267,510,000	25.90
Belanja jasa lainnya	9,294,506,250	7,788,167,800	19.34
Belanja biaya pemeliharaan jaringan	49,335,000	0	100.00
Belanja perjalanan biasa	1,150,825,877	1,390,905,245	(20.86)
Belanja perjalanan dinas dalam kota	40,700,000	0	100.00
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	247,800,000	120,870,000	51.22
Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	2,371,717,560	2,527,413,173	(6.56)
Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat/Pemda	41,181,148,008	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	115,610,990,323	12,665,708,118	812.79
Pengembalian Belanja	-	(15,552,200)	(100.00)
Jumlah Belanja Bersih	115,610,990,323	12,650,155,918	813.91

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2015, Direktorat Bina Gizi tidak ada alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.6 Belanja Modal Tanah

Pada Tahun Anggaran 2015, Direktorat Bina Gizi tidak ada alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal Tanah.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.
254.662.000,-

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 254.662.000,- mengalami kenaikan sebesar 52,06 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2014 sebesar Rp. 167.475.000,-. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah dan jenis peralatan dan mesin yaitu alat pengolah data (notebook, hard disk eksternal, printer portable, scanner portable serta handycam dan tripodnya).

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2015	REALISASI 30 JUNI 2014	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah Data	254,662,000	167,475,000	52.06
Jumlah Belanja Kotor	254,662,000	167,475,000	52.06
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	254,662,000	167,475,000	52.06

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2015, Direktorat Bina Gizi tidak ada alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2015, Direktorat Bina Gizi tidak ada alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.10 Belanja Modal Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2015, Direktorat Bina Gizi tidak ada alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal Lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 2.164.922.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.164.922.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember 2014
Bank BNI KC Tebet No.Rek. 98218312	1,259,170,365	-
Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran	17,030,660	-
Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu	601,814,250	-
GUP yang belum terbit SP2D	286,906,725	-
Jumlah	2,164,922,000	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp. 0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 715.872.116,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	30 Juni 2015	31 Desember 2014
Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	-	5,054,546
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Dana Kegiatan Hibah yang belum dibayarkan)	-	4,552,800
Dana Hibah (UNICEF) yang belum dikembalikan ke donor	-	706,264,770
Jumlah	-	715,872,116

Persediaan Rp.
49.152.058.759,-

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 49.152.058.759,- dan Rp. 43.496.358.027,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30 Juni 2015	31 Desember 2014
Barang Konsumsi	380,688,386	733,269,779
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat	48,771,370,373	42,763,088,248
Jumlah	49,152,058,759	43,496,358,027

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan yang merupakan barang konsumsi senilai Rp. 380.688.386,- terdiri dari barang-barang cetakan seperti buku cetakan/pedoman, leaflet, poster, dan CD/DVD.

Sementara persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp. 48.771.370.373,- merupakan buffer stock pusat yang digunakan untuk keperluan strategis seperti bencana alam, Kasus Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan lain sebagainya. Adapun rincian barang persediaan tersebut per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

1. TPG kit untuk pemeriksaan garam beryodium sebanyak 36 set senilai Rp. 957.132,-
2. Taburia (NICE Project) sebanyak 5.608 sachet senilai Rp. 2.394.616,-
3. Buffer stock MP-ASI APBNP Tahun 2013 sebanyak 2.341 kg senilai Rp. 60.046.650,-
4. Iodina Test Tahun 2013 sebanyak 800 set senilai Rp. 25.200.000,-
5. Food Model Tahun 2013 sebanyak 1 set senilai Rp. 6.265.805,-
6. Buffer Stock PMT-AS APBN 2014 sebanyak 64.135 kg senilai Rp. 3.866.057.800,-
7. Iodina Test Tahun 2014 sebanyak 17 set senilai Rp. 538.390,-
8. Buffer Stock PMT Ibu Hamil KEK Tahun 2015 sebanyak 933.890 kg senilai Rp. 44.809.909.980,-

Peralatan dan Mesin
Rp. 4.770.816.680,-

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp. 4.802.928.680,- dan Rp. 4.563.996.680,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	4,563,996,680
Mutasi tambah:	
Pembelian	254,662,000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(15,730,000)
Saldo per 30 Juni 2015	4,802,928,680
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2015	(3,791,125,742)
Nilai Buku per 30 Juni 2015	1,011,802,938

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian komputer unit berupa Notebook/Laptop sebanyak 7 (tujuh) unit senilai Rp. 123.662.000,-
- Pembelian peralatan komputer berupa External/Portable Hardisk sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp. 10.890.000,-
- Pembelian peralatan komputer berupa scanner (portable) sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp. 55.440.000,-
- Pembelian peralatan komputer berupa printer (portable) sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp. 40.920.000,-
- Pembelian alat rumah tangga berupa Handy Cam sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 17.800.000,- dan
- Pembelian alat studio berupa Tripod Kamera sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 5.950.000,-

Mutasi kurang merupakan transfer keluar alat rumah tangga berupa meja kerja kayu dan alat kantor berupa lemari kayu ke Poltekkes Jakarta II. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp.
(3.791.125.742),-

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp. (3.791.125.742),- dan Rp. (3.753.069.861),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,802,928,680	3,791,125,742	1,011,802,938
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		4,802,928,680	3,791,125,742	1,011,802,938

Aset Tak Berwujud Rp.
151.150.000,-

C.6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp. 151.150.000,- dan Rp. 151.150.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Direktorat Bina Gizi berupa *software* yang digunakan/diinstall pada komputer/laptop untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	151,150,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2015	151,150,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	151,150,000

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Aplikasi Pelaporan SMS Gateway	Rp 95.750.000
2	Microsoft Windows 7 (4 buah)	Rp 7.900.000
3	Microsoft Office 2010 (4 buah)	Rp 19.900.000
4	Adobe Photoshop (4 buah)	Rp 27.600.000
Jumlah		Rp 151.150.000

*Aset Lain-Lain Rp.
182.306.000,-*

C.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp. 182.306.000,- dan Rp. 190.278.500,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	190,278,500
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- Penghapusan BMN	(7,972,500)
Saldo per 30 Juni 2015	182,306,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2015	-
Nilai Buku per 30 Juni 2015	182,306,000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tidak ada penambahan aset lain-lain berasal dari reklasifikasi aset tetap.
- Penghapusan BMN yang merupakan transfer keluar aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional entitas ke Poltekkes Jakarta II berupa Meja Kerja Kayu dan Lemari Kayu senilai Rp. 7.972.500,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp(182.306.000)

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp. (182.306.000) dan Rp. (190.278.500). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-Lain	182,306,000	182,306,000	0
Jumlah	182,306,000	182,306,000	0

Uang Muka dari KPPN
Rp. 2.164.922.000,-

C.9 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 2.164.922.000,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 0

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 4.552.800,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp. 0*

C.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing- masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 5.054.546,-.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Utang tersebut merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014.

*Ekuitas
Rp. 146.013.305.656*

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.315.011.697,- dan Rp. 45.164.699.616,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
45.164.699.616,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.164.699.616,- dan Rp0.

*Defisit LO Rp.
(109.820.466.221)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. (109.820.466.221) dan Rp. 0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan pada 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Koreksi Aset Tetap
Rp. 0*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap pada 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Koreksi Atas Beban
Rp. 0*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban pada 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp. 0*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Ekuitas Akhir Rp.
50.315.011.697*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.315.011.697,- dan Rp. 0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Update aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan berbasis akrual baru di *launching* pada awal bulan Juli 2015 sehingga harus dilakukan penyesuaian data aset dan persediaan antara data di aplikasi SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan.
2. Terhadap akun Persediaan yang belum diregister yang ada di neraca aplikasi SAIBA, maka dilakukan jurnal penyesuaian terhadap akun tersebut setiap bulan dari Januari s.d. Juni 2015. Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Persediaan yang belum diregister	DEBET
Beban Bahan	KREDIT

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Proses rekonsiliasi antara Satuan Kerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat dengan KPPN Jakarta VII mengalami kendala dalam penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi dikarenakan sistem aplikasi rekonsiliasi di KPPN Jakarta VII masih menyesuaikan dengan sistem SPAN Kementerian Keuangan RI.
2. Selama periode Semester I TA 2015, terdapat penggunaan dana hibah yang berasal dari Bantuan Dana UNICEF dan WHO untuk kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat yang belum dimasukkan ke dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat TA 2015. Kegiatan yang berasal dari dana hibah Bantuan Dana UNICEF dan WHO akan dimasukkan ke dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat pada periode Triwulan IV TA 2015 melalui revisi DIPA.

Lampiran A1

Direktorat Bina Gizi
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2015

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2014	Beban Peny. Tahun 2015	Akm. Peny. Per 30-06-2015	Nilai Buku Per 30-06-2015
A	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1,483,430,500	1,291,759,112	-	1,291,759,112	191,671,388
2	Alat Ukur	5	28,366,000	28,366,000	-	28,366,000	-
3	Alat Kantor	5	651,681,100	563,993,100	-	563,993,100	87,688,000
4	Alat Rumah Tangga	5	113,812,000	111,742,000	-	97,792,000	16,020,000
5	Alat Studio	5	121,352,600	75,279,910	-	75,874,910	45,477,690
6	Alat Komunikasi	5	6,459,000	6,459,000	-	6,459,000	-
7	Alat Kedokteran	5	13,800,000	13,800,000	-	13,800,000	-
8	Alat Kesehatan Umum	5	93,800,000	28,140,000	-	28,140,000	65,660,000
9	Alat Khusus Kepolisian	4	4,709,320	2,943,325	-	2,943,325	1,765,995
10	Komputer Unit	4	1,838,240,300	1,365,234,213	-	1,403,009,212	435,231,088
11	Peralatan Komputer	4	447,277,860	265,353,201	-	278,989,083	168,288,777
	Jumlah		4,802,928,680	3,753,069,861	-	3,791,125,742	1,011,802,938
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
C	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
D	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	4	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
F	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud*		-	-	-	-	-
2	Aset yang dihentikan penggunaannya		182,306,000	190,278,500	-	182,306,000	-
	Jumlah		182,306,000	190,278,500	-	182,306,000	-
	Total		4,985,234,680	3,943,348,361	-	3,973,431,742	1,011,802,938

* Beban Amortisasi



KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telp. Dirjen. 021-5203871, Set. Ditjen 021-5221225 - 5221226

Telp. Dit Bina Gizi: 021-5203883, Dit Bina Kes. Ibu: 021-5221227, Dit Bina Kes Anak: 021-5273422,
Dit Yankes Tradisional, Alternatif & Komplementer 021-5203116, Dit Bina Kesja & Olahraga: 021-5275256

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT BINA GIZI
PERIODE 30 JUNI 2015**

I. PENDAHULUAN

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5533;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 22) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.06/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 25) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/Per/I/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Barang, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang di Daerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
- 26) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 27) Surat Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013;
- 28) Surat Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-171/KN/2014 tanggal 14 Februari 2014 hal Penjelasan Catatan Ringkas Barang.
- 29) PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- 30) KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

Periode Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah per-tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015 dengan nilai BMN pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 30 Juni sebesar Rp. 54.288.443.439,- dan terjadi akumulasi penyusutan BMN atas aset tetap sebesar Rp. 3.973.431.742,- **sehingga nilai Netto BMN pada akun Neraca sebesar Rp. 50.315.011.697,-**

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya. Asal perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh Satuan Kerja harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Petunjuk teknis tentang kebijakan penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Kebijakan Penatausahaan dan Pengelolaan (Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, Hibah) Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin dalam pengelolaan BMN Kementerian Kesehatan.

Untuk memudahkan Satuan Kerja untuk mengimplementasikan Peraturan Pengelolaan BMN, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan acuan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/SK/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Protap Penatausahaan BMN, Nomor 1816/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Protap Akuntansi Persediaan, Nomor 362/MENKES/SK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta Surat Edaran Nomor KN.02.03/III/991/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Pengelolaan Rumah Negara Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat maka Penerapan Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara pada periode pelaporan Semester I tahun 2013. Metode yang digunakan garis lurus tanpa ada nilai residu.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Tanah;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Bila terjadi normalisasi data dalam proses migrasi maka Satuan Kerja harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi fisik barang;
2. Jika barang tersebut secara fisik ada maka dilakukan *entry* pada menu Saldo Awal;
3. Jika barang tidak diketemukan dan/atau sudah dilakukan penghapusan dan/atau *transfer* keluar maka Pimpinan Satuan Kerja membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan permasalahan tersebut;

4. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut maka BMN tidak perlu dilakukan *entry*. Proses tindak lanjut atas normalisasi data BMN diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Kebijakan Akuntansi BMN Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. BMN hasil pengadaan Kantor Pusat yang diserahkan-operasikan ke Pemerintah Daerah tetap dicatat dan disajikan sebagai Persediaan dalam Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-BMN), namun tidak disajikan pada Neraca (SAKPA). Akibat perbedaan perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan data dari keduanya berbeda, untuk itu agar dibuat penjelasan yang memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
2. BMN hasil pengadaan Kantor Pusat yang sudah diserahkan-operasikan ke Pemerintah Daerah yang telah dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap (dalam SIMAK-BMN), agar direklasifikasi ke dalam akun "Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah".
3. BMN yang berada pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum TA 2011 tetap dicatat dan disajikan sebagai "Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah" dalam Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-BMN), namun tidak disajikan pada Neraca (SAKPA). Akibat perbedaan perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan data dari keduanya berbeda, untuk itu agar dibuat penjelasan yang memadai dalam CaLBMN dan CaLK.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Aset Tak Berwujud;
5. Laporan Kondisi Barang; *untuk tahun 2014*
6. Laporan Penyusutan;
7. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
8. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Satker Direktorat Bina Gizi, dan
9. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 30 JUNI 2015

1. Saldo Awal Direktorat Bina Gizi

Nilai BMN per 01 Januari 2015 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sebesar Rp 4.760.975.180,- (*Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 4.754.275.180,- (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 6.700.000,- (*Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Satker Direktorat Bina Gizi.

Mutasi BMN per 30 Juni adalah sebagai berikut:

a. **Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada *Direktorat Bina Gizi* per 30 Juni 2015 sebesar Rp 49.152.058.759 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 43.496.358.027 (*Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*) dan total mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 5.655.700.732 (*Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	733,269,779	(352,581,393)	380,688,386
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	42,763,088,248	6,008,282,125	48,771,370,373
JUMLAH		43,496,358,027	5,655,700,732	49,152,058,759

Tidak ada Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang

Persediaan yang merupakan barang konsumsi senilai Rp. 380.688.386,- terdiri dari barang-barang cetakan seperti buku cetakan/pedoman, leaflet, poster, dan CD/DVD.

Sementara persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp. 48.771.370.373,- merupakan buffer stock pusat yang digunakan untuk keperluan strategis seperti bencana alam, Kasus Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan lain sebagainya. Adapun rincian barang persediaan tersebut per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

1. TPG kit untuk pemeriksaan garam beryodium sebanyak 36 set senilai Rp. 957.132,-
2. Taburia (NICE Project) sebanyak 5.608 sachet senilai Rp. 2.394.616,-

3. Buffer stock MP-ASI APBNP Tahun 2013 sebanyak 2.341 kg senilai Rp. 60.046.650,-
4. Iodina Test Tahun 2013 sebanyak 800 set senilai Rp. 25.200.000,-
5. Food Model Tahun 2013 sebanyak 1 set senilai Rp. 6.265.805,-
6. Buffer Stock PMT-AS APBN 2014 sebanyak 64.135 kg senilai Rp. 3.866.057.800,-
7. Iodina Test Tahun 2014 sebanyak 17 set senilai Rp. 538.390,-
8. Buffer Stock PMT Ibu Hamil KEK Tahun 2015 sebanyak 933.890 kg senilai Rp. 44.809.909.980,-

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 4.802.928.680 (*Empat Milliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 4.563.996.680 (*Empat Milliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 254.662.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 23.702.500 (*Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 sebesar Rp 4.802.928.680 (*Empat Milliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 516 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 4.563.996.680 (*Empat Milliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), Mutasi Tambah jumlah barang sebanyak 47 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 254.662.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang sebanyak 4 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 15.730.000,- (*Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 254.662.000 tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	254,662,000	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/Sitaan	0	0
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Bangun Serah Guna	0	0
Bangun Guna Serah	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian aset selama tahun anggaran 2015 melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat TA 2015, yaitu berupa :

- a. Pembelian komputer unit berupa Notebook/Laptop sebanyak 7 (tujuh) unit senilai Rp. 123.662.000,-
- b. Pembelian peralatan komputer berupa External/Portable Hardisk sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp. 10.890.000,-
- c. Pembelian peralatan komputer berupa scanner (portable) sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp. 55.440.000,-
- d. Pembelian peralatan komputer berupa printer (portable) sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp. 40.920.000,-
- e. Pembelian alat rumah tangga berupa Handy Cam sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 17.800.000,- dan
- f. Pembelian alat studio berupa Tripod Kamera sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 5.950.000,-

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15.730.000,- tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	15,730,000	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin terjadi karena pengalihan aset dari Satuan Kerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat ke Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Jakarta II sebesar Rp. 15.730.000,- (Berita Acara terlampir)

Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, tidak ada Peralatan dan Mesin yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah tersebut Peralatan dan Mesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (...satuan...)	Nilai (Rp)
Baik	555	4,595,544,880
Rusak Ringan	194	154,011,000
Rusak Berat	73	393,528,800

Kelompok barang *Peralatan dan Mesin* yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 11 unit / Rp 7.972.500 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 3.791.125.742
(Tiga Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu
Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

c. **Aset Lainnya**

Saldo Aset lainnya pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 151.150.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 151.150.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp 7.972.500 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 151.150.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 13 buah dengan nilai sebesar Rp 151.150.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan selama periode tahun 2015 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, tidak ada asset yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan. Selain itu, tidak ada Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 182.306.000 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp 190.278.500 (Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), mutasi kurang sejumlah 11 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 7.972.500 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian BMN dari penggunaan	0	0

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	7,972,500	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0	0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Golongan Barang		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	7.972.500	0
JUMLAH		7.972.500	0

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah adalah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 7.972.500 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)

3. Barang Milik Negara pada Direktorat Bina Gizi Per 30 Juni 2015

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Direktorat Bina Gizi Per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 50.315.011.697 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel (Rp)		Ekstrakomptabel (Rp)		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	49.152.058.759				49.152.058.759	
	Sub Jumlah (1)	49.152.058.759				49.152.058.759	
II	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	4.802.928.680		6.700.000		4.809.628.680	
	Sub Jumlah (2)	4.802.928.680		6.700.000		4.809.628.680	
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud	151.150.000				151.150.000	
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	182.306.000				182.306.000	
	Sub Jumlah (3)	333.456.000				333.456.000	
Total		54.288.443.439		6.700.000		54.295.143.439	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel (Rp)		Ekstrakomptabel (Rp)		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	3.791.125.742		6.700.000		3.797.825.742	
	Sub Jumlah (1)	3.791.125.742		6.700.000		3.797.825.742	
II	Aset Lainnya						
1	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	182.306.000				182.306.000	
	Sub Jumlah (2)	182.306.000				182.306.000	
Total							

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Direktorat Bina Gizi per 30 Juni 2015 per akun neraca adalah sebagai berikut :

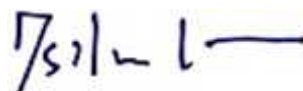
No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	49.152.058.759	49.152.058.759	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	1.011.802.938	1.011.802.938	-
4	Gedung dan Bangunan			-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
6	Aset lainnya			-
7	KDP			-
8	Aset Tak Berwujud	151.150.000	151.150.000	-
9	Aset Lain-Lain	-	-	-
	Total	50.315.011.697	50.315.011.697	-

*)

Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan

Jakarta, 6 Juli 2015
Penanggungjawab Direktorat Bina Gizi
Kuasa Pengguna Barang/Direktur Bina Gizi


Ir. Doddy Izwardy, MA
NIP. 196302161986031005

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI per 30 Juni 2014	REALISASI per 30 Juni 2013	Naik (Turun) %
Belanja keperluan perkantoran	145,800,000	150,300,000	(2,99)
Belanja honor operasional satuan kerja	148,500,000	180,900,000	(17,91)
Belanja bahan	321,520,945	201,061,900	59,91
Belanja honor output kegiatan	57,220,000	35,400,000	61,64
Belanja barang non operasional lainnya	56,250,000	0	100,00
Belanja barang persediaan barang konsumsi	60,172,846,683	0	100,00
Belanja sewa	36,020,000	3,180,000	1,032,70
Belanja jasa profesi	336,800,000	267,510,000	25,90
Belanja jasa lainnya	9,294,506,250	7,788,167,800	19,34
Belanja biaya pemeliharaan jaringan	49,335,000	0	100,00
Belanja perjalanan biasa	1,150,825,877	1,390,905,245	(20,86)
Belanja perjalanan dinas dalam kota	40,700,000	0	100,00
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	247,800,000	120,870,000	51,22
Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	2,371,717,560	2,527,413,173	(6,56)
Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat/Pemda	41,181,148,008	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	115,610,990,323	12,665,708,118	812,79
Pengembalian Belanja	-	(15,552,200)	(100,00)
Jumlah Belanja Bersih	115,610,990,323	12,650,155,918	813,91